

Pendampingan Pengisian dan Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi dan Sosialisasi Pemadanan NIK-NPWP Pada PMKM Prima Indonesia

Imelda Sinaga^{1)*}, Andy Fitriyadi Dharma Tilaar²⁾, Sri Suyarti³⁾

¹⁾²⁾³⁾ Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiaras
Jl. Purnawirawan Raya No.14, Gedong Meneng, Bandar Lampung, Indonesia

¹⁾proficiatmelsi@gmail.com

Jejak artikel:

Unggah artikel 2 Mei 2023;
Perbaikan 3 Mei 2023;
Diterima 9 Mei 2023;
Tersedia online 10 Mei 2023

Kata kunci:

SPT Tahunan
Pemadanan
NIK
NPWP
PMKM

Abstrak

Penerapan pilar ketiga dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan STIE Gentiaras dengan mitranya PMKM Prima Indonesia. Kegiatan dengan tema pendampingan pengisian dan pelaporan SPT Tahunan orang pribadi dan sosialisasi pemadanan NIK-NPWP dapat digunakan sebagai sarana membina para dosen dalam meningkatkan daya saing, kemampuan, keterampilan, kemandirian dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Hasil dari kegiatan yang dilakukan mendapatkan respon yang baik dan peserta mendapatkan manfaat yaitu dapat menyelesaikan proses pelaporan SPT Tahunan atas kewajibannya dalam perpajakan. Kegiatan ini juga bermanfaat membantu pemerintah dalam sosialisasi pemadanan NIK-NPWP dilingkungan PMKM Prima Indonesia.

I. PENDAHULUAN

Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari tiga pilar yaitu menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sudah menjadi kewajiban dan dilaksanakan di lingkungan pendidikan tinggi tertuang dalam Pasal 1 Ayat 9 UU No.12 tahun 2012 (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, 2012). Peran perguruan tinggi pada pilar ketiga yaitu pengabdian kepada masyarakat sangat perlu diperhatikan dan diterapkan dengan cara yang tepat, bersinergi dan tepat sasaran. STIE Gentiaras dalam pelaksanaan pilar ke tiga Tri Dharma tersebut bermitra dengan Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah (PMKM) Prima Indonesia Provinsi Lampung melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema pendampingan pengisian dan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi dan Sosialisasi Pemadanan NIK-NPWP.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah para wajib pajak orang pribadi dalam penyampaian laporan SPT Tahunannya dan pemadanan NIK – NPWP dapat dimaksimalkan terutama dikalangan PMKM Prima Indonesia. Kegiatan yang melibatkan para anggota PMKM Prima Indonesia diharapkan di masa yang akan datang dapat lebih mandiri dalam penyampaian SPT Tahunan dan kesadaran akan kewajiban perpajakan terlaksana dengan semestinya sesuai undang-undang yang berlaku.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan (Munawar et al., 2015) Tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah: 1) Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan. 2) Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. 3) Meningkatkan peran usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan(Edy et al., 2021).

* Corresponding author

Tabel 1 Kriteria Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah

No	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah
1	Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.	Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.	Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2	Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).	Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).	Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
3	Nilai nominal dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden (Pemerintah Republik Indonesia, 2008).	Nilai nominal dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden.	Nilai nominal dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden.

Sumber:(Kurniasih, 2021)

Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) merupakan formulir yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran PPh, objek pajak PPh, bukan objek pajak PPh, harta dan kewajiban (Direktorat Jenderal Pajak, 2013). Kewajiban perpajakan meliputi: mendaftarkan, menghitung, membayar dan melaporkan. Mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP jika telah memenuhi syarat objektif dan subjektif. Menghitung pajak yang harus dibayar sesuai dengan kegiatan usaha wajib pajak. Membayar pajak yang seharusnya dibayar dengan mekanisme membayar sendiri ke kas negara (melalui kantor pos atau bank persepsi) dan pemotongan/pemungutan pajak oleh pihak lain. Melaporkan seluruh kegiatan usaha dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan Tahunan sesuai kondisi sebenarnya(Online-pajak.com, 2018).

Jenis-jenis SPT Orang Pribadi yaitu:

1. 1770 mempunyai penghasilan: dari usaha/pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan atau norma penghitungan penghasilan neto dari satu atau lebih pemberi kerja; yang dikenakan PPh Final dan/atau bersifat final; dari penghasilan lain.
2. 1770 S mempunyai penghasilan: dari satu atau lebih pemberi kerja, dalam negeri lainnya; yang dikenakan PPh Final dan/atau bersifat final.
3. 1770 SS mempunyai penghasilan: selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari Rp60.000.000,00 setahun (pekerjaan dari satu atau lebih pemberi kerja).
4. Penyampaian SPT Tahunan dapat dilakukan dengan mendatangi langsung KPP atau KP2KP, melalui e-filing atau e-form, kantor pos, melalui jasa ekspedisi (tercatat), maupun menggunakan penyedia jasa aplikasi perpajakan. Dokumen yang dipersiapkan dalam mengisi SPT Tahunan adalah: bukti potong PPh (jika ada), kartu keluarga, daftar harta, daftar utang, catatan omzet per bulan, bukti penyeteroran PPh Final (Yanti et al., 2022)

NIK merupakan identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Penggunaan NIK sebagai NPWP ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Bagi wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk, Direktorat Jenderal Pajak memberikan NPWP dengan mengaktivasi NIK:
 1. Berdasarkan permohonan pendaftaran wajib pajak

2. Secara jabatan.
- b) Bagi wajib pajak orang pribadi bukan penduduk, wajib pajak badan, dan wajib pajak instansi pemerintah, Direktorat Jenderal Pajak memberikan NPWP dengan format 16 (enam belas) digit:
 1. Berdasarkan permohonan pendaftaran wajib pajak
 2. Secara jabatan.

Dalam penggunaan NIK sebagai NPWP bagi wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk, data identitas wajib pajak dilakukan pemadanan dengan data kependudukan yang ada di Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hasil pemadanan data tersebut dikelompokkan menjadi data valid dan belum valid. Data yang belum valid saat pemadanan maka DJP akan menyampaikan permintaan klarifikasi atas hasil data pemadanan kepada wajib pajak melalui laman DJP, alamat pos elektronik wajib pajak, contact center DJP, saluran lainnya yang ditentukan DJP. Klasifikasi atas data hasil pemadanan NIK sebagai NPWP oleh DJP dilakukan juga untuk klarifikasi data seperti: data alamat pos elektronik dan nomor telepon seluler, alamat tempat tinggal wajib pajak berdasarkan keadaan yang sebenarnya, data klasifikasi lapangan usaha, data unit keluarga. Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) tidak diwajibkan untuk menyetorkan pajak atas pendapatannya.

Tujuan dan manfaat yang diharapkan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat STIE Gentiaras ini adalah:

1. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh para dosen STIE Gentiaras dengan tepat sasaran dan berkontribusi luas kepada mitra pada khususnya dan kepada masyarakat luas pada umumnya.
2. Memperkenalkan kembali kepada seluruh anggota PMKM Prima Indonesia akan kewajiban perpajakan sebagai wajib pajak orang pribadi yang harus disampaikan pelaporannya dengan batas waktu 31 Maret tahun berjalan.
3. Memberikan edukasi perpajakan kepada peserta kegiatan agar memahami pentingnya memiliki NPWP dalam bisnis atau usaha yang dijalankan.
4. Pengenalan kembali layanan DJP secara elektronik dan kemudahan yang disediakan dalam pelaporan SPT Tahunan.
5. Peningkatan capaian laporan SPT Tahunan pada anggota PMKM Prima Indonesia.
6. Sosialisasi pemadanan NIK – NPWP yang akan efektif pada 01 Januari 2024 dengan penerapan core, pelayanan, penyuluhan, support system, database manajemen sesuai data yang dipetakan DJP (Kementerian Keuangan, 2023).

II. METODE

Metode dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang digunakan adalah metode modifikasi pendekatan (Vincent II, 2009) dengan tahapan sebagai berikut:

1. Melakukan identifikasi masalah yang dihadapi mitra,
2. Mengumpulkan dan analisis data,
3. Menentukan masalah yang lebih spesifik,
4. Mempersiapkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat,
5. Proses pelaksanaan dan pendampingan kegiatan pengabdian kepada masyarakat,
6. Melakukan *review* dan evaluasi kegiatan yang telah dijalankan

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2023 dimulai pada pukul 13.00 WIB s.d selesai. Tempat pelaksanaan di Dapur Kelinci yang beralamat di jalan Sultan Agung, Sepang Jaya, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung yang merupakan satu-satunya pusat kuliner dengan olahan daging kelinci. Peserta pengabdian kepada masyarakat adalah anggota dari PMKM Prima Indonesia dan DPD diwakilkan oleh Ibu Ririn Sri Lestari. Peserta berjumlah 22 melibatkan mahasiswa relawan pajak dari *Tax Center* STIE Gentiaras dan perwakilan dari DJP Bengkulu dan Lampung.



Gambar 1 Pelaksanaan

Materi kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai berikut:

Tabel 2 Susunan Acara Pengabdian Kepada Masyarakat 20 Maret 2023

Jam/WIB	Acara	Materi	Person In Charge (PIC)
13.00 – 13.15	Pembukaan	Doa Pembukaan dan Sambutan selamat datang dari pemilik Kuliner Dapur Kelinci, PMKM Prima Indonesia	Kristiana Yulianti
13.15 – 13.30	Penyampaian Materi	SPT Tahunan Orang Pribadi dan UMKM	Andy Fitriyadi Dharma Tilaar
13.30 – 13.45	Penyampaian Materi	Laporan Keuangan Sederhana UMKM	Imelda Sinaga
13.45 – 14.00	Penyampaian Materi	Dasar peraturan pemadanan NIK-NPWP	Sri Suyarti
14.00 – 17.00	Simulasi dan Praktek Langsung	Pelaporan SPT Tahunan dan Pemadanan NIK-NPWP	- Tim PKM STIE Gentiaras - Anggota PMKM Prima Indonesia
17.00 – 17.10	Penutup	Sambutan perwakilan dari Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	Perwakilan Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung
17.10 – 17.20	Sayonara	Kesan dan Pesan dari DPD Prima Indonesia	Ririn Sri Lestari

Peserta mengikuti kegiatan dengan mempersiapkan dokumen-dokumen yang akan digunakan sebagai isian data pada pelaporan SPT Tahunan dan pendaftaran NPWP baru bagi yang membuka usaha atau bisnis barunya di tahun 2023. Terdapat juga PMKM yang menyiapkan laporan keuangan sederhana yang didiskusikan saat kegiatan berlangsung.

Tabel 3 Luaran Kegiatan yang Tercapai

Tujuan Kegiatan	Luaran	Persentase Sebelum	Persentase Sesudah	Keterangan
1. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh para dosen STIE Gentiaras dengan tepat sasaran dan berkontribusi luas kepada mitra pada khususnya dan kepada masuarakat luas pada umumnya.	Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada tanggal 20 Maret 2023 pada PMKM Prima Indonesia	30%	98%	Terselenggara dengan baik
2. Memperkenalkan kembali kepada seluruh anggota PMKM Prima Indonesia akan kewajiban perpajakan sebagai wajib pajak orang pribadi yang harus disampaikan pelaporannya dengan batas waktu 31 Maret tahun berjalan.	Penyampaian materi SPT Tahunan Orang Pribadi dan UMKM	30%	98%	Ada Peningkatan
3. Memberikan edukasi perpajakan kepada peserta kegiatan agar memahami pentingnya memiliki NPWP dalam bisnis atau usaha yang dijalankan.	<p>Peserta kegiatan pengabdian kepada masyarakat membuat NPWP baru untuk bidang usaha atau bisnisnya yang belum dilengkapi dengan NPWP.</p> <p>Peserta mulai memisahkan NPWP orang pribadi dengan NPWP badan usaha.</p>	0%	60%	Ada Peningkatan
4. Pengenalan kembali layanan DJP secara elektronik dan kemudahan yang disediakan dalam pelaporan SPT Tahunan.	<p>Peserta praktek langsung melakukan penyampaian SPT Tahunan secara online menggunakan e-Filing. Wajib Pajak masuk ke laman resmi DJP Online www.pajak.go.id menggunakan laptop maupun handphone peserta. Login menggunakan NIK/NPWP dan password serta kode keamanan.</p>	30%	100%	Ada Peningkatan
5. Peningkatan capaian laporan SPT Tahunan pada anggota PMKM Prima Indonesia.	Peserta praktek langsung melakukan penyampaian SPT Tahunan secara online menggunakan e-Filing.	65%	85%	Ada Peningkatan
6. Sosialisasi pepadanan NIK – NPWP yang akan efektif pada 01 Januari 2024 dengan penerapan <i>core</i> , pelayanan, penyuluhan,	Penyampaian materi pepadanan NIK-NPWP dan praktek langsung pepadanan NIK peserta	25%	50%	Ada Peningkatan

support system, database kegiatan pengabdian
manajemen sesuai data yang kepada masyarakat.
dipetakan DJP

IV. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan bersama mitra yaitu PMKM Prima Indonesia terlaksana dengan baik dan lancar. Memperluas jejaring antara dosen dengan dunia usaha sebagai mitra dan melatih kemampuan serta kemahiran para dosen sesuai bidang ilmu yang dimilikinya untuk diserahkan kembali kepada masyarakat berupa pengabdian kepada masyarakat dalam konkrit atau tindakan nyata. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat dilaksanakan berkelanjutan dan dapat meningkatkan jumlah para wajib pajak orang pribadi dalam penyampaian laporan SPT Tahunannya dan pepadanan NIK – NPWP dapat dimaksimalkan terutama dikalangan PMKM Prima Indonesia dan untuk masyarakat umum lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak. (2013). *Bentuk, Isi, Tatacara Pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 Serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26*. <https://Pajak.Go.Id/>. <https://pajak.go.id/id/peraturan/bentuk-isi-tata-cara-pengisian-dan-penyampaian-surat-pemberitahuan-masa-pajak-0>
- Edy, T. I., Yanti, L. D., Aprilyanti, R., & Janamarta, S. (2021). Analysis of the Compliance Level of Micro, Small and Medium Enterprises Taxpayers after the implementation of Government Regulation Number 23 of 2018. *ECo-Buss*, 3(3), 103–109. <https://doi.org/https://doi.org/10.32877/eb.v3i3.203>
- Kementerian Keuangan. (2023). *Menyongsong Era Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Penjelasan Pengenaan Pajak Penghasilan 5 % atas Gaji Rp5.000.000,-*. <https://bppk.kemenkeu.go.id/>. <https://bppk.kemenkeu.go.id/balai-diklat-keuangan-manado/berita/menyongsong-era-nomor-induk-kependudukan-nik-sebagai-nomor-pokok-wajib-pajak-npwp-dan-penjelasan-pengenaan-pajak-penghasilan-5-persen-atas-gaji-rp5000000-balai-diklat-keuangan-manado-tahun-anggaran-2023-055495>
- Kurniasih, W. (2021). *Pengertian UMKM: Kriteria, Aturan, Peran Dan Contoh - Gramedia Literasi*. www.Gramedia.Com. <https://www.gramedia.com/literasi/umkm/>
- Munawar, S. S., Juningsih, E. R., & Maulana, D. S. (2015). Proceeding Seminar Nasional Peningkatan Kapabilitas UMKM dalam Mewujudkan Umkm Naik Kelas Peran Komunikasi Pemasaran Dalam Sudut Pandang Umkm: Pembelajaran Untuk Pemberdayaan Umkm. *Seminar Nasional 5th UNS SME SUMMIT & AWARDS 2016 Peningkatan Kapabilitas UMKM Dalam Mewujudkan “UMKM Naik Kelas,”* 336–345.
- Online-pajak.com. (2018). *Mudahnya Daftar EFIN Wajib Pajak Badan di OnlinePajak*. www.Online-Pajak.Com. <https://www.online-pajak.com/tips-efiling/daftar-efin-online>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2008). UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. In *UU No. 20 Tahun 2008* (Issue 1, pp. 1–31).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, <https://peraturan.bpk.go.id/> (2012).
- Vincent II, J. W. (Jack). (2009). Community development practice. In R. Phillips & R. H. Pittman (Eds.), *An Introduction to Community Development* (First Edition). Routledge.
- Yanti, L. D., Oktari, Y., Aprilyanti, R., Jenni, J., & Novianti, R. (2022). Penyuluhan Kepatuhan Pelaporan Pajak dalam rangka pengabdian kepada masyarakat Pada Pemuda Tridharma Indonesia Cabang Wihara Dharma Pala. *NEAR: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 40–45. <https://doi.org/10.32877/nr.v2i1.573>